

LEMBAGA KREATIFITAS MAHASISWA SEBAGAI WADAH PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL

OLEH
NANDANG MULYANA, ASRI AFRIDA JUNIAR, MOCHAMMAD ZAINUDDIN

Abstrak

Kreatifitas merupakan hal yang paling utama untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dengan kreatifitas akan tercipta berbagai inovasi yang berguna baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Kreatifitas seringkali muncul dari kaum muda. Mahasiswa sebagai kaum muda yang banyak menghasilkan kreatifitas. Hal ini dikarenakan mahasiswa sebagai intelektual muda selalu diharapkan oleh masyarakat mempunyai daya kreatif yang tinggi untuk menghasilkan inovasi yang selanjutnya bermanfaat bagi kehidupan masyarakat secara keseluruhan.

Kota Bandung memiliki potensi besar dalam tumbuhnya industri kreatif. Hal ini dikarenakan di Kota Bandung terdapat banyak perguruan tinggi. Implementasi dari potensi kreatifitas ini dapat dilihat dari berkembangnya industri kreatif di Kota Bandung. Kota Bandung dikenal dengan wisata kuliner, *fashion*, tempat wisata alam, dan lain-lain. Kota Bandung menjadi barometer perkembangan industri kreatif di Indonesia. Untuk mengembangkan potensi tersebut tentunya dibutuhkan dari berbagai pihak, termasuk perguruan tinggi. Dengan mengembangkan industri kreatif dikalangan mahasiswa maka dapat mendorong tumbuhnya wirausaha baru yang didasarkan kepada kreatifitas dalam mengembangkan inovasi baru.

Pendahuluan

Sekitar 634 *brand* kewirausahaan yang ada di Kota Bandung. Data itu adalah data yang tercatat di Dinas Pemuda dan Olahraga. Data ini memperlihatkan kreatifitas masyarakat Kota Bandung. Selain keberadaan perguruan tinggi di Kota Bandung juga mendukung kreatifitas khususnya dikalangan mahasiswa. Perguruan tinggi yang ada di Kota Bandung dapat mempengaruhi kreatifitas mahasiswa dalam menciptakan sebuah inovasi baru. Banyak varian makanan yang dahulu merupakan makanan tradisional disulap menjadi makanan dengan kemasan, bentuk

dan rasa kekinian di Kota Bandung. Contoh yang paling nyata adalah keripik singkong yang selanjutnya diinovasi dengan berbagai varian rasa serta kemasan yang menawan. Demikian juga makanan mocha yang khas Sukabumi diinovasi dengan campuran ice cream sehingga lebih menarik dari sisi rasa.

Kreatifitas dikalangan mahasiswa juga didukung dengan adanya program dari perguruan tinggi yang mendorong mahasiswa untuk menampilkan hasil kreatifitasnya. Program kreatifitas mahasiswa sebagai salah satu contoh dari program perguruan tinggi dalam mendorong mahasiswa untuk berkreasi.

Dengan adanya program kreatifitas mahasiswa ini pada akhirnya mahasiswa diharapkan untuk menjadi jembatan dalam mengembangkan usaha yang ada dalam masyarakat. Hal ini tentunya berkaitan dengan terkenalnya Kota Bandung sebagai tujuan wisata yang banyak dikunjungi wisatawan. Selain itu Kota Bandung juga banyak ditemukan ikon-ikon khususnya makanan. Pada akhirnya produk yang dihasilkan dapat mempunyai nilai ekonomi yang lebih tinggi lagi.

Dalam rangka mewedahi kreatifitas mahasiswa di Kota Bandung ini perlu adanya lembaga yang dapat menaunginya. Lembaga tersebut dapat digunakan oleh mahasiswa untuk menyalurkan kreatifitasnya dalam membantu masyarakat mengembangkan usahanya. Dengan adanya lembaga tersebut selain kreatifitas mahasiwa tersalurkan juga dapat mengembangkan ekonomi local di Kota Bandung.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Tinjauan Pengembangan Ekonomi Lokal

Pengembangan ekonomi lokal menurut Blakely dan Bradshaw adalah proses dimana pemerintah lokal dan organisasi masyarakat terlibat untuk mendorong, merangsang, memelihara, aktivitas usaha untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Pengembangan ekonomi lokal adalah suatu proses yang melibatkan pembentukan kelembagaan baru, perkembangan industri baru, pengembangan kapasitas pekerja untuk menghasilkan produk yang lebih bermutu, identifikasi pasar baru serta pendirian usaha-usaha baru. Sedangkan menurut Wold Bank (2001) adalah proses dimana para pelaku pembangunan, bekerja kolektif dengan mitra dari sector publik, swasta dan non pemerintah, untuk menciptakan kondisi lebih baik bagi pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja (dalam Nurzaman, 2002).

Potensi ekonomi daerah didefinisikan oleh Suparmoko (2002) sebagai “kemampuan

ekonomi yang ada di daerah yang mungkin dan layak dikembangkan sehingga akan terus berkembang menjadi sumber penghidupan rakyat setempat bahkan dapat mendorong perekonomian daerah secara keseluruhan untuk berkembang dengan sendirinya dan berkesinambungan.” Sumihardjo (2008) menjelaskan bahwa pengembangan sektor unggulan yang dimiliki daerah tercermin pada visi dan misi daerah yang tertuang di dalam rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) dan rencana jangka menengah daerah (RPJMD). Hal tersebut merupakan upaya pemerintah dalam pengembangan potensi daerah yang tertuang dalam perencanaan pembangunan daerah.

Tarigan (2002) menjelaskan bahwa teori basis ekonomi mendasarkan pandangannya bahwa laju pertumbuhan ekonomi suatu wilayah ditentukan oleh besarnya peningkatan ekspor dari wilayah tersebut. Perekonomian regional dapat dibagi menjadi dua sektor, yaitu kegiatan basis dan bukan basis. Kegiatan basis adalah mengekspor barang dan jasa ke tempat-tempat di luar batas-batas perekonomian masyarakat yang bersangkutan. Sedangkan kegiatan bukan basis adalah kegiatan yang tidak mengekspor, yakni hanya kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan di dalam daerah itu sendiri.

Bertambah banyaknya kegiatan basis di dalam suatu daerah akan menambah permintaan terhadap barang dan jasa di dalamnya dan menimbulkan kenaikan volume kegiatan bukan basis. Sebaliknya, berkurangnya kegiatan basis akan mengakibatkan berkurangnya pendapatan yang mengalir masuk ke dalam daerah yang bersangkutan dan turunya permintaan terhadap produk dari kegiatan bukan basis. Dengan demikian kegiatan basis ekonomi mempunyai peranan sebagai penggerak pertama (primer mover rule), sedangkan setiap perubahan mempunyai “efek multiplier” terhadap perekonomian regional, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Untuk mengetahui sektor basis dan bukan basis antara

lain menggunakan metode analisis *location quotient* (LQ). (Triyuwono & Yustika, 2003).

Dengan mengetahui kegiatan basis disuatu daerah berdasarkan potensi yang dimilikinya, maka dapat menguatkan daya saing daerah tersebut. Menurut 18 Abdullah (2002) “daya saing daerah adalah kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan domestik dan internasional.” Indikator-indikator utama dan prinsip-prinsip penentu daya saing daerah salah satunya adalah perekonomian daerah. Prinsip-prinsip kinerja perekonomian daerah yang mempengaruhi daya saing daerah yakni :

- a. Nilai tambah merefleksikan produktivitas perekonomian setidaknya jangka pendek
- b. Akumulasi modal mutlak diperlukan untuk meningkatkan daya saing dalam jangka panjang
- c. Kemakmuran suatu daerah mencerminkan kinerja ekonomi dimasa lalu
- d. Kompetisi yang didorong mekanisme pasar akan meningkatkan kinerja ekonomi suatu daerah.

Semakin ketat kompetisi pada suatu perekonomian daerah, maka akan semakin kompetitif perusahaan-perusahaan yang akan bersaing secara internasional maupun domestik (dalam Hermayanti (2013).

2. Tinjauan Pengembangan Masyarakat

Salah satu model intervensi yang dikemukakan oleh Glen dalam kaitan dengan praktik komunitas (*community practice*) adalah Pengembangan Masyarakat. Pengembangan masyarakat oleh Brokensha dan Hodge (dalam Adi, 2013:150), mendefinisikan pengembangan masyarakat sebagai suatu gerakan yang dirancang guna meningkatkan taraf hidup keseluruhan

masyarakat melalui partisipasi aktif dan inisiatif dari masyarakat.

Pengertian lain juga disampaikan oleh Dunham (1958), bahwa pengembangan masyarakat adalah berbagai upaya yang terorganisir yang dilakukan guna meningkatkan kondisi kehidupan masyarakat, terutama melalui usaha yang kooperatif dan mengembangkan kemandirian dari masyarakat pedesaan, tapi hal tersebut dilakukan dengan bantuan teknis dari pemerintah ataupun lembaga-lembaga sukarela (Adi, 2013:150).

Sedangkan menurut Suharto (2005:42), pengembangan masyarakat lokal sebagai salah satu dari model pengembangan masyarakat didefinisikan sebagai proses yang ditujukan untuk menciptakan kemajuan sosial dan ekonomi bagi masyarakat melalui partisipasi aktif serta inisiatif anggota masyarakat itu sendiri. Anggota masyarakat dipandang bukan sebagai sistem klien yang bermasalah melainkan sebagai masyarakat yang unik dan memiliki potensi, hanya saja potensi tersebut belum sepenuhnya dikembangkan.

Pengembangan masyarakat lokal pada dasarnya merupakan proses interaksi antara anggota masyarakat setempat yang difasilitasi oleh pekerja sosial. Pekerja sosial membantu meningkatkan kesadaran dan mengembangkan kemampuan mereka dalam mencapai tujuan-tujuan yang diharapkan. Pengembangan masyarakat lokal lebih berorientasi pada tujuan proses (*process goal*) daripada tujuan tugas atau tujuan hasil (*task or product goal*). Setiap anggota masyarakat bertanggung jawab untuk menentukan tujuan dan memilih strategi yang tepat untuk mencapai tujuan tersebut. Pengembangan kepemimpinan lokal, peningkatan strategi kemandiria, peningkatan informasi, komunikasi, relasi dan keterlibatan anggota masyarakat merupakan inti proses pengembangan masyarakat lokal yang bernuansa *bottom-up* ini (Suharto, 2005:43).

Pengembangan masyarakat merupakan salah satu model intervensi yang dikemukakan oleh Glen dalam kaitan dengan praktik komunitas. Pendekatan ini pada dasarnya

sangat kental dipengaruhi oleh pandangan yang berkembang dalam diskursus komunitas, di mana hakikat dari kesejahteraan (*nature of welfare*) pada diskursus ini dilihat dari adanya atau tumbuhnya partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam proses pemberdayaan masyarakat menjadi salah satu kunci terciptanya kesejahteraan sosial. Keterlibatan masyarakat baik secara fisik, pemikiran, material maupun financial diharapkan akan dapat meningkatkan rasa kebersamaan dan rasa memiliki proses dan hasil pembangunan di komunitas tersebut (Adi, 2013:147).

Sementara itu, terkait dengan peran praktisi dalam diskursus komunitas, maka peran yang dijalankan akan terkait dengan relasi yang egalitarian antara praktisi dengan warga masyarakat. Maka, peran praktisi dalam diskursus komunitas lebih mengarah pada peran sebagai *community worker* ataupun pemercepat perubahan (*enabler*). Bila dilihat pandangan Spergel (1975) dan Zastrow (1986), peran sebagai *enabler* dan *community worker* lebih mengarah pada upaya intervensi komunitas melalui pendekatan yang *nonoppressive* dan upaya penanganan masalah secara konsensus. Peran di atas lebih mengarah pada peran *community worker* sebagai fasilitator (Adi, 2013:148).

Menurut Adi (2013:202), pembangunan masyarakat Desa yang sekarang disebut juga dengan nama pemberdayaan masyarakat Desa, pada dasarnya serupa dan setara dengan konsep pengembangan masyarakat (*community development* atau CD). Dalam upaya pengembangan masyarakat tingkat lokal, baik organisasi pemerintah maupun nonpemerintah, selain dibantu oleh tenaga pendamping (*fieldworker* atau fasilitator lapangan) biasanya dibantu oleh tenaga kader (*indigenous worker*). Kader diharapkan dapat menggantikan peranan petugas pembangunan Desa dalam melanjutkan kegiatan-kegiatan pembangunan Desa. Kader adalah orang-orang yang berasal dari masyarakat setempat yang dengan sukarela bersedia ikut serta dalam pelaksanaan berbagai kegiatan dalam program

pembangunan Desa. Tugas seorang kader pada intinya adalah: 1) sebagai pelopor dalam melaksanakan kegiatan; 2) pelaksana dan pemelihara kegiatan program pembangunan Desa; 3) menjaga terjadinya kelangsungan kegiatan; 4) membantu dan menghubungkan antara warga masyarakat dengan lembaga-lembaga yang bekerja dalam bidang pembangunan Desa.

Sementara itu, tahapan pengembangan masyarakat yang biasa dilakukan pada beberapa organisasi pelayanan kemanusiaan (*human service organization*) yang disampaikan oleh Adi (2013:179), secara umum dilakukan mencakup beberapa tahapan di bawah ini:

- a. *Tahap persiapan*, pada tahap ini di dalamnya terdapat tahap persiapan petugas dan tahap persiapan lapangan;
- b. *Tahap assessment*, proses ini dilakukan dengan mengidentifikasi masalah (kebutuhan yang dirasakan atau *felt needs*) ataupun kebutuhan yang diekspresikan (*expressed needs*) dan juga sumber daya yang dimiliki oleh komunitas sasaran. Dalam analisis kebutuhan masyarakat ini dapat digunakan berbagai teknik untuk melakukan *assessment*, seperti teknik SWOT, metode Delphi, diskusi kelompok, curah pendapat atau *nominal group process* dan PLA (*participatory learning and action*).
- c. *Tahap perencanaan alternatif program*, pada tahap ini pelaku perubahan (*community worker*) secara partisipatif mencoba melibatkan warga untuk berpikir tentang masalah yang mereka hadapi dan bagaimana cara mengatasinya. Dalam upaya mengatasi permasalahan yang ada masyarakat diharapkan dapat memikirkan beberapa alternatif program dan kegiatan yang dapat mereka lakukan.
- d. *Tahap pemformulasian rencana aksi*, pada tahap ini pelaku perubahan

membantu masing-masing kelompok untuk merumuskan dan menentukan program dan kegiatan apa yang akan mereka lakukan guna mengatasi permasalahan yang ada.

- e. *Tahap pelaksanaan atau implementasi program*, tahap pelaksanaan ini merupakan salah tahap yang paling krusial atau penting dalam proses pengembangan masyarakat, karena sesuatu yang sudah direncanakan dengan baik akan dapat melenceng dalam pelaksanaan di lapangan bila tidak ada kerja sama antara pelaku perubahan dan warga masyarakat, maupun kerja sama antarwarga.
- f. *Tahap evaluasi proses dan hasil perubahan*, evaluasi sebagai proses pengawasan dari warga dan petugas terhadap program yang sedang berjalan pada pengembangan masyarakat sebaiknya dilakukan dengan melibatkan warga, karena dengan keterlibatan warga dalam tahap ini diharapkan akan terbentuk suatu sistem dalam komunitas untuk melakukan pengawasan secara internal sehingga dalam jangka panjang diharapkan akan dapat membentuk suatu sistem dalam masyarakat yang lebih mandiri dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Evaluasi proses diharapkan dapat memberikan umpan balik yang berguna bagi perbaikan suatu program atau kegiatan. Evaluasi itu sendiri dapat dilakukan pada input, proses (pemantauan atau monitoring) dan juga pada hasil.
- g. *Tahap terminasi*, tahap ini merupakan tahap di mana sudah selesainya hubungan secara formal dengan komunitas sasaran. Terminasi dilakukan seringkali bukan karena masyarakat sudah dapat dianggap mandiri, tetapi tidak jarang terjadi karena proyek sudah harus dihentikan karena sudah melebihi jangka waktu

yang ditetapkan sebelumnya, atau karena anggaran sudah selesai dan tidak ada penyandang dana yang dapat dan mau meneruskan. Meskipun demikian tidak jarang *community worker* tetap melakukan kontak meskipun tidak secara rutin.

METODE

Kajian ini menggunakan data sekunder yang didasarkan kepada studi dokumentasi dan pustaka. Studi dokumentasi lebih diarahkan untuk mengkaji dan menganalisis hasil laporan serta data yang telah dipublikasikan yang berkaitan dengan fenomena yang dikaji. Sementara itu studi pustaka lebih diarahkan untuk menganalisis fenomena yang ada didasarkan kepada konsep atau teori yang sesuai dengan fenomena yang dikaji.

PEMBAHASAN

1. *Kelompok Sasaran*

Penanaman modal adalah bentuk kegiatan menanam modal baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah daerah. Penanam modal dalam negeri yang akan melakukan penanaman modal di daerah dapat mengajukan permohonan pendaftaran penanaman modal kepada BPMPPT, apabila diperlukan dalam pengurus perizinan pelaksanaan penanaman modalnya.

Bisnis yang digeluti oleh mahasiswa tersebut dapat digolongkan sebagai Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) jika dilihat dari cakupan bisnis dan keuntungan yang diperoleh masih tidak begitu besar. Pemerintah kini sedang gencar memberdayakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Menurut Jason Tedjasukmana (2016) menyatakan bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia perlu lebih banyak lagi UMKM yang terlibat dalam sektor ekonomi digital. Dengan pemanfaatan teknologi digital UMKM

dapat tumbuh lebih cepat dari segi pendapatan dan penyediaan layanan kerja serta menjadi lebih inovatif dan kompetitif. Dari data yang diperoleh, 36% UKM di Indonesia masih offline, dan 37% hanya memiliki kemampuan online yang sangat mendasar atau basic, 18% memiliki kemampuan online menengah, dan baru 9% yang memiliki kemampuan bisnis online lanjutan.

Pemerintah Kota Bandung memperkenalkan aplikasi guna mempermudah warga Bandung guna mendapatkan perizinan Usaha Kecil dan Menengah yang bernama Gampil (*Gadget Mobile Application for Licence*). Untuk menjadi pengusaha Mikro tidak perlu lagi izin, cukup memberitahukan kepada pemerintah kota, kemudian akan direspon dengan mengeluarkan tanda daftar usaha kecil/mikro dan itu langsung *bankable* untuk skema Kredit Usaha Rakyat. Pemkot Bandung telah memberikan fasilitas yang mudah serta bunga yang seringan-ringannya. Bunga KUR saat ini hanya 9% per-tahun dari sebelumnya 22%. Tahun depan pun akan diturunkan lagi menjadi 7%. Aplikasi ini dibangun oleh BPPT Kota Bandung dan akan menjadi pilot di Indonesia. Kelebihannya adalah sudah terkoneksi langsung dengan pihak perbankan. Program Gampil ini memberikan proteksi dan pemberdayaan potensi ekonomi lokal bagi warga Kota Bandung. Tentunya ini juga dapat dimanfaatkan oleh Mahasiswa yang akan menjadi investor.¹⁹

2. Faktor Lokasi

Faktor lokasi ketika mahasiswa akan melakukan baik promosi ataupun penjualan produknya kepada konsumen terbilang mudah. Yang menjadi sasaran serta potensi dalam pengembangan ekonomi lokal ini adalah sekitar Perguruan Tinggi di mana menjadi tempat yang strategis. Dalam segi tenaga kerja pun dapat bekerja sama dengan mahasiswa lain

atau bias juga dengan masyarakat sekitar. Ketersediaan air bersih pun tidak menjadi hal yang sulit. Untuk sarana transportasi di Bandung pun tidak menjadi hal yang sulit, karena banyak sarana transportasi yang dapat digunakan.

Program Mahasiswa Wirausaha (PMW) bertujuan untuk memberikan bekal pengetahuan, keterampilan dan sikap atau jiwa wirausaha (*entrepreneurship*) berbasis ipteks kepada para mahasiswa agar dapat mengubah pola pikir (*mindset*) dari pencari kerja (*jobseeker*) menjadi pencipta lapangan pekerjaan (*job creator*) serta menjadi calon/pengusaha yang tangguh dan sukses menghadapi persaingan global. Program ini juga bertujuan mendorong kelembagaan atau unit kewirausahaan di perguruan tinggi agar dapat mendukung pengembangan program-program kewirausahaan. Sebagai hasil akhir, diharapkan terjadinya penurunan angka pengangguran lulusan pendidikan tinggi. Keberhasilan program ini setidaknya-tidaknya dilihat dari tiga indikator, yaitu jumlah mahasiswa yang berhasil menjalankan usaha (sebagai wirausaha), terbentuknya model pendidikan kewirausahaan di perguruan tinggi, dan terbentuknya lembaga pengembangan pendidikan kewirausahaan yang mengkoordinasikan berbagai kegiatan terkait kewirausahaan di perguruan tinggi. Selain itu juga, memfasilitasi para mahasiswa yang mempunyai minat berwirausaha dan memulai usaha dengan basis ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. Fasilitas yang diberikan meliputi pendidikan dan pelatihan kewirausahaan, magang, penyusunan rencana bisnis, dukungan permodalan dan pendampingan serta keberlanjutan usaha.

Berbagai macam ilmu yang mereka dapatkan telah membawa mereka pada satu kondisi di mana mahasiswa akan menjadi lebih kritis dalam berbagai hal inovatif yang dapat mereka lakukan. Perguruan Tinggi dapat bekerjasama dengan Program Peningkatan

¹⁹<http://marketeers.com/kang-emil-pahlawan-kota-bandung-adalah-ukm/>

Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas Mahasiswa yang difasilitasi oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans), dan Program Pemberian Modal Usaha untuk Mahasiswa yang diberikan oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menkop UKM). Selain itu juga program Wirausaha untuk mahasiswa yang di fasilitasi oleh lembaga-lembaga keuangan.

3. Keterkaitan dan Fokus Kebijakan

Pemerintah memaksimalkan peran dan posisi sebagai penentu arah pembangunan ekonomi di mana diarahkan dengan kewenangan regulator dan fasilitasnya. Pada sektor usaha dan investasi yang kondusif merupakan faktor terpenting dalam menyelenggarakan kegiatan usaha, di mana jenis investasi yang masuk mengacuk pada perencanaan dan kebijakan yang suda dibuat, dan diarahkan pada penciptaan lapangan pekerjaan serta peningkatan sarana produksi.

Melalui pemberdayaan Usaha Kecil Menengah dan Koperasi dimana terdapat penyempurnaan peraturan yang terkait perijinan bagi UKMK, pengembangan jasa konsultasi bagi industri kecil dan menengah, peningkatan akses UKMK kepada sumber daya financial dan sumber daya produktif lainnya, serta penguatan kemitraan Usaha Besar dan UKMK.²⁰

Sebagai fokus pemerintah dalam kebijakan perluasan ekonomi, terdapat Peraturan Walikota Bandung Nomor 495 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur dala Pelayanan Perizinan terpadu sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal, Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung, dan Peraturan Daerah

Kota Bandung Nomor 22 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perizinan.

4. Pengembangan Berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development*) bukanlah hal baru bagi masyarakat secara umum. Prinsip pembangunan berkelanjutan adakah “memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan. Ada beberapa aspek yang harus diperhatikan dalam pembangunan berkelanjutan mulai dari ekonomi, sosial dan lingkungan. Melalui ketiga aspek tersebut harus di perhatikan guna dapat digunakan untuk jangka menengah dan jangka panjang. Pastinya perencanaan pembangunan berkelanjutan perlu di rumuskan bersama dan harus ada sinergitas dalam mewujudkannya.

Bandung yang dikenal dikalangan masyarakat lokal (domestik) dan mancanegara memiliki sejuta keindahan dan keunikan disetiap perjalanannya. Pada hal ini bisa dilihat Bandung memiliki potensi dalam pengembangan ekonomi lokal, baik dari kalangan muda sampai dengan yang sudah mulai tidak produktif bisa menghasilkan suatu karya untuk mengembangkan potensi. Bandung dengan memiliki banyak perguruan tinggi ternama, dapat mendatangkan mahasiswa yang berasal dari luar kota dan bisa berkarya di Kota Bandung. Konteks pembangunan berkelanjutan dengan banyaknya hasil kreatifitas kalangan muda Bandung terutama pada mahasiswa harus dapat memberikan efek pada masyarakat serta peluang dan ancaman bagi usaha yang dilakukannya.

Faktor ekonomi dalam pembangunan berkelanjutan cemilan yang ada di Bandung memiliki banyak peluang dalam mengembangkan potensi yang ada. Dapat dicontohkan dengan adanya program pemerintah Kota Bandung dalam aspek

²⁰ Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006

ekonomi guna peningkatan pelaku-pelaku usaha yang ada di Kota Bandung dalam hal ini hasil kreatifitas mahasiswa. Wali Kota Bandung Ridwan Kamil mengutarakan rencana dan fokus pengembangan Kota Bandung perihal peningkatan ekonomi kerakyatan. Hal tersebut disampaikan usai memberi arahan pada Musrembang Kota Bandung Tahun 2016, Peningkatan kualitas sosial ekonomi kota Bandung yang cerdas dan berdaya saing melalui penguatan infrastruktur, daya beli dan pemberdayaan kewilayahan tahun 2017.²¹ Penjelasan dari pemimpin baru yang banyak dikenal oleh masyarakat dapat mendukung dalam peningkatan kualitas sosial ekonomi di Kota Bandung. Dalam hal ini pegiat kreatif cemilan Bandung harus bisa memanfaatkan sebagai sarana pembangunan berkelanjutan.

Perkembangan zaman yang semakin canggih harus dapat diikuti oleh para pegiat di Kota Bandung dengan kreatifitas yang berbeda pula tetapi tidak menghilangkan esensi yang ada dari produk yang dihasilkan. Mulai dari kemasan produk yang bisa dijadikan lebih menarik kepada konsumen. Kemudahan akses internet harus digunakan sebagai sarana pembangunan berkelanjutan dengan memberikan inovasi terbaru dari Kota Bandung yang pada akhirnya meningkatkan hasil pegiat. Perluasan segmentasi pasar dari produk yang dihasilkan bisa menjadi pembangunan berkelanjutan dari pegiat kreatifitas cemilan Bandung dalam jangka menengah dan jangka panjang ketika segmentasi pasar yang dilakukan sudah tepat sasaran.

Aspek sosial dalam pembangunan berkelanjutan cemilan bandung harus bisa memberikan dampak positif pada peningkatan kesejahteraan dengan menggali kembali potensi lokal yang ada dan pada akhirnya sebagai pengembangan masyarakat di Kota Bandung guna jangka menengah dan jangka

panjang. Seperti adanya lapangan pekerjaan khususnya bagi warga Kota Bandung yang membutuhkan pekerjaan guna peningkatan kesejahteraan.

Aspek lingkungan dalam pembangunan berkelanjutan dengan pengembangan ekonomi lokal ini, semakin besar tempat yang menjadi hasil produksi maupun pemasaran dari cemilan Kota Bandung harus memilik AMDAL yang tepat guna. Dapat dilihat adanya banjir yang diakibatkan salah satunya dari sampah. Sampah tersebut tidak hanya dari masyarakat, tetapi bisa juga dari pegiat kreatifitas. Oleh karena itu, selagi merintis dari awal Cemilan Bandung harus mulai menggunakan bahan yang efektif guna pengurangan bahaya potensial lingkungan yang ada di Kota Bandung, Seperti mulalilah membuang sampah pada tempatnya, hasil dari produksi yang sebelumnya menggunakan kantong plastic harus mulai dikurangi dan gunakan produk yang memang aman dan sehat.

5. Tata Pemerintah

Berkembangnya UKM di Kota Bandung tidak lepas dari kreatifitas dan produktivitas dalam mengolah produk dan manajemen bisnis. Ada banyak hal yang bisa dilakukan untuk mengembangkan diri, apalagi derasnya usaha dari pemerintah untuk membantu pengembangan para UKM dalam bisnisnya. Salah satunya dengan pemanfaatan Gedung Smesco KUKM untuk menjadi fasilitas galeri sekaligus tempat wadah inkubator bagi para UKM.

Pelatihan dan workshop bagi para UKM akan turut serta membantu pengembangan bisnis mereka. Hal tersebut tentu disertai dengan ketelatenan pemerintah dalam membimbing masyarakat UKM. Bukan hanya sekedar menjalankan program, tetapi bisa berhasil sukses, atau setidaknya naik tingkat level sertifikasi dari kurang layak menjadi

²¹<https://portal.bandung.go.id/posts/2016/03/08/pNzA/ridwan-kamil-fokus-tingkatkan-ekonomi-kerakyatan>

layak. Peran serta pemerintah terutama Kementerian Koperasi dan UKM hendaknya tersinergikan dengan garis kementerian lainnya yang berkaitan dengan bisnis, serta peran dari pemerintah daerah sendiri yang mengawal masyarakatnya dalam berbisnis.

Pemerintah Kota Bandung dalam kemitraan antara pemerintah dengan dunia usaha mengeluarkan 5 cara untuk mengembangkan para pegiat kreatifitas terutama cemilan Bandung. Ada beberapa inovatif yang dilakukan oleh Ridwan Kamil dalam memudahkan administrasi perijinan dan mempromosikan produk para pengembang ekonomi lokal.²²

a. **Gampil** (*Gadget Mobile Application for Licence*).

Para pengusaha tidak khawatir dengan ijin usaha yang sulit dalam administrasi, karena Pemerintah Kota Bandung sudah mempermudah dengan cukup memberitahu usahanya ke Pemerintah Kota Bandung, maka keluar tanda daftar usaha kecil atau mikro, langsung *bankable* untuk skema KUR. Proses pengeluaran ijin usaha ini cukup melalui telepon seluler. Program Gampil ini memberikan proteksi dan pemberdayaan potensi ekonomi lokal bagi warga Kota Bandung. Hanya dengan *keyword* Gampil di *Playstore*, warga yang memiliki KTP Bandung bisa mengunduh aplikasi dan daftar ijin usaha. Gampil, khusus buat warga ber-KTP Bandung.

b. Program Melati (Melawan Rentenir).

Permasalahan yang dihadapi oleh para pegiat pengembangan ekonomi lokal banyak yang terjebak oleh para rentenir. Usaha kecil dengan modal seadanya, tentu peluang ruginya banyak. Solusi yang sering diambil dengan pembayaran cicilan. Keadaan yang miris tapi klasik, karena sudah lama hal tersebut terjadi. Program Melati ini sangat bermanfaat bagi pengusaha kecil yang sering kekurangan modal usaha.

c. *Creatif Center*.

Creatif Center ini akan dilengkapi fasilitas yang mendukung kreativitas guna pengembangan pelaku usaha Bandung makin kreatif. Gedung Smesco rencananya akan dilengkapi dengan workshop, bioskop, perpustakaan dan studio. Ada *innovation center*, alat-alat berat seperti laser dan printer 3D untuk contoh model produk. Semoga dengan adanya *creatif center*, sinergi pegiat kreatif Kota Bandung bisa bermanfaat ke masyarakat lokal dan mancanegara yang akan mencari hasil kreatifitas dari para pegiat bisnis mahasiswa Bandung.

d. Program *Little Bandung*.

Program *Little Bandung* sebagai salah satu program strategi pemasaran UKM Bandung *Go Internasional*. Selain itu juga sebagai salah satu respon Indonesia terhadap keberadaan Masyarakat Ekonomi Asean. Program ini menjadi media promosi produk-produk kreatif usaha kecil dan menengah Kota Bandung untuk dikenal di Mancanegara. Promosi ini melalui kegiatan pameran produk-produk khas dan kreatif Kota Bandung.

e. Ridwan Kamil Promosikan UKM Bandung.

Ridwan Kamil turut mempromosikan UKM Bandung. Sebagai walikota, Kang Emil sudah seperti *brand ambassador* para UKM Bandung. Dia tampil di depan umum untuk mengenalkan produk-produk UKM. Menarik bila memerhatikan poin-poin dari kebijakan pemerintah daerah Kota Bandung. Kebijakan lahir berdasarkan fenomena dan budaya sosial warga Bandung, sehingga dari kebijakan tersebut diharapkan dapat mampu mengangkat masyarakat Bandung memiliki ekonomi yang baik dan sejahtera.

²² <https://motekar.web.id/2016/03/09/5-cara-ridwan-kamil-kembangkan-ukm-bandung/>

6. Proses Manajemen

Potensi mahasiswa untuk terus berinovasi dan menciptakan suatu makanan ringan dengan kreatifitasnya tentu menjadi modal mereka. Apalagi dengan *image* Kota Bandung yang memang tidak hanya sebagai kawasan pendidikan, yang mampu menarik perhatian wisatawan domestik maupun luar negeri untuk datang. Hal ini tentunya dapat menjadi bidikan mahasiswa dalam berkreatifitas menciptakan produk makanan ringan dengan inovasi baru. Seperti halnya keripik maicing ataupun keripik karuhun yang menjadi trend tidak hanya bagi warga Bandung tetapi juga menyebar ke seluruh Jawa Barat tetapi juga tidak menutup kemungkinan sampai ke luar Jawa Barat. Tentunya hal itu membuat daya saing tersendiri bagi mahasiswa yang ingin berwirausaha di mana mereka terus melakukan inovasi baru. Dalam hal ini mahasiswa dapat bekerjasama dengan Dikti melalui Program Mahasiswa Wirausaha, Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas Mahasiswa yang difasilitasi oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemanakertrans), dan Program Pemberian Modal Usaha untuk Mahasiswa yang diberikan oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menkop UKM). Selain itu juga program Wirausaha untuk mahasiswa yang difasilitasi oleh lembaga-lembaga keuangan.

Tentunya juga terkait dengan produk yang dihasilkan oleh mahasiswa berupa makanan ringan dapat bekerjasama dengan Dinas Koperasi UKM, di mana ini sesuai dengan misinya di mana salah satunya adalah untuk memberikan fasilitas perkembangan koperasi, usaha kecil menengah, perindustrian dan perdagangan. Maka dari itu juga Disperindag dapat dilibatkan dalam perkembangan ekonomi lokal Bandung hasil dari kreativitas mahasiswa. Disperindag juga dapat dijadikan salah satu stakeholder untuk dilibatkan kerjasama terkait legalitas dari

produk dan perusahaan yang diproduksi. Selain itu, Badan Pengawas Obat dan Makanan juga dapat dilibatkan untuk bekerjasama dalam hal uji kelayakan makanan dari produk tersebut.

Sebagaimana pelaksanaannya, analisis sistem pada pokoknya adalah suatu teknik untuk menganalisis tahapan permasalahan secara menyeluruh dan lengkap. Seperti halnya, suatu teknik organisasional dan penyidikan, dan karenanya secara potensial menyediakan suatu metode praktek bagi seluruh pekerja sosial untuk memakainya, sepantasnyalah dilakukan penelitian lanjutan. Sistem analisis ini bukan berarti akan menyelesaikan seluruh atau sebagian besar permasalahan profesi, tetapi akan membantu dalam perencanaan dan pengorganisasian suatu kasus, dan dengan demikian secara potensial akan memberikan pelayanan yang lebih baik terhadap klien. Selanjutnya ditambahkan, sistem ini secara nyata memberikan suatu model tahap demi tahap mengenai penerapan keterampilan, dan dengan demikian seharusnya meningkatkan imej masyarakat secara positif tentang pekerjaan sosial. Dengan model ini pekerja sosial dapat mendemonstrasikan pemakaian suatu pendekatan pemecahan masalah profesional dengan alasannya : (a) menilai kebutuhan-kebutuhan klien, (b) menentukan tujuan (*setting goals*), (c) mempertimbangkan secara hati-hati beragam strategi intervensi, (d) memilih dan mengimplementasikan strategi yang layak dan praktis, dan mengevaluasi hasil dari strategi yang diterapkan.²³

Di dalam melaksanakan tugasnya, seorang pekerja sosial akan berhadapan dengan berbagai pihak dan berbagai sub system baik di masyarakat maupun secara kelembagaan. Seorang pekerja sosial harus dapat menentukan bahwa perubahan yang dilakukannya akan menguntungkan pihak siapa, dan tidak memihak pada satu pihak saja (berat sebelah). Perubahan akan dilaksanakan

²³<http://kesos.unpad.ac.id/2010/08/05/pendekatan-sistem-dalam-praktik-pekerjaan-sosial/>

oleh siapa dan siapa yang akan diubah (sasaran perubahan). Untuk lebih memudahkan pekerja sosial dalam bekerja, maka digunakan sistem dasar dalam praktek pekerjaan sosial yang terdiri dari :

- a) Sistem pelaksana perubahan : yaitu pekerja sosial dan orang-orang yang menjadi bagian dari badan atau lembaga sosial yang mempekerjakan pekerja sosial
- b) Sistem klien : yaitu orang-orang yang memberikan kewenangan atau meminta pelayanan pekerja sosial, yang sudah menjadi penerima layanan yang mempunyai persetujuan kerja dengan pekerja sosial
- c) Sistem sasaran : yaitu orang-orang yang perlu dirubah untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan oleh pekerja sosial
- d) Sistem kegiatan : yaitu pekerja sosial bersama orang-orang yang diajaknya bekerjasama untuk mencapai tujuan dan mempengaruhi sistem sasaran.

Dalam hal ini maka dapat digunakan pula guna menganalisis sistem dasar dalam upaya pengembangan ekonomi lokal. Dilakukannya analisis sistem dasar ini bertujuan untuk memudahkan apa yang akan dilakukan selanjutnya guna membantu keberlangsungan bisnis dari hasil kreatifitas mahasiswa.

PENUTUP

Untuk menunjang keberlanjutan kreatifitas mahasiswa dalam rangka pengembangan ekonomi lokal dibutuhkan lembaga kreatifitas khusus yang dapat menaungi mahasiswa. Lembaga ini sebagai suatu kegiatan pengembangan ekonomi lokal yang menaungi hasil dari kreatifitas mahasiswa dan menjadi posisi terkuat. Hal ini ditujukan apabila ingin melakukan peminjaman untuk modal pihak terkait dapat mempercayakan mahasiswa namun atas nama

lembaga tersebut. Tentunya ini akan memudahkan dalam mempertahankan keberlangsungan produk tersebut, sehingga diharapkan tidak ada lagi yang meminjam modal kepada rentenir di mana dapat mengancam keberadaan produk tersebut apabila terjadi kendala dalam pembayaran.

Sebelumnya perlu dilakukan analisis sistem dasar dalam upaya melakukan perubahan. Untuk sistem klien sendiri adalah lembaga kreatifitas mahasiswa, di mana lembaga ini menjadi wadah berkumpulnya mahasiswa yang bergelut di dunia bisnis. Sistem sarannya yaitu mahasiswa, yang mana mahasiswa ini adalah mereka yang baru berkecimpung dalam dunia bisnis di Bandung. Kemudian untuk sistem pelaksana atau agen perubahannya adalah pekerja sosial, dan kemudian yang menjadi sistem kegiatan adalah Dispora (Dinas Pemuda dan Olahraga) Kota Bandung.

Adanya lembaga kreatifitas mahasiswa ini juga tidak hanya diperuntukkan bagi mahasiswa yang sudah lama bergelut di dunia bisnis namun juga bagi mahasiswa yang baru atau merintis usaha di dunia bisnis. Sehingga harapannya adalah adanya interaksi satu sama lain di mana antar mahasiswa dapat saling bertukar informasi atau berkeaktifitas bahkan berkolaborasi bersama dalam pengembangan ekonomi lokal di Bandung.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adi, Isbandi Rukmito. 2013. *Intervensi Komunitas & Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Bornstein, David. 2006. *Mengubah Dunia; Kewirausahaan Sosial dan Kekuatan Gagasan Baru*, Jakarta: Kerjasama

Jurnal Penelitian & PPM	ISSN: 2442-448X	Vol 4, No: 2	Hal: 129 - 389	Juli 2017
-------------------------	-----------------	--------------	----------------	-----------

Yayasan Nurani Dunia dengan INSIST Press

Suharto, Edi. 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: PT Refika Aditama.

Sumber lain

<http://belmawa.ristekdikti.go.id/dev/wp-content/uploads/2015/11/6.-Pedoman-PMW-2015.pdf>

<http://bppt.bandung.go.id/web/assets/uploads/files/BPPT-PERWAL%20SOP%20495%20Tahun%202015.pdf>

<https://febriyanto79.wordpress.com/2014/09/15/strategi-peningkatan-kewirausahaan-bagi-mahasiswa-di-pendidikan-tinggi/>

<http://kesos.unpad.ac.id/2010/08/05/pendekatan-sistem-dalam-praktik-pekerjaan-sosial>

<https://hardiutomo.wordpress.com/2013/02/26/kewirausahaan-sosial/>

<http://littlebandung.co.id/littlebandungmj/>

<http://marketeers.com/kang-emil-pahlawan-kota-bandung-adalah-ukm/>

<https://motekar.web.id/2016/03/09/5-cara-ridwan-kamil-kembangkan-ukm-bandung/>

<https://student.unud.ac.id/sarasatipramudiawp/news/941>

<https://portal.bandung.go.id/posts/2016/03/08/pNzA/ridwan-kamil-fokus-tingkatkan-ekonomi-kerakyatan>